

TAJUK RENCANA

Perkembangan Pemberangkatan Haji yang Dinanti

HARUS disyukuri, sudah ada perkembangan berarti terkait pemberangkatan haji tahun 2022. Pertama terkait kebijakan pemerintah Arab Saudi pelonggaran protokol kesehatan yang tertuang dalam edaran dari Ot-oritas Bandara Arab Saudi atau General Authority of Civil Aviation (GACA) per 5 Maret 2022.

Ada tujuh kebijakan lama yang dicabut, antara lain terkait pembatasan jarak sosial dan karantina. Dalam hal ini Arab Saudi sudah tidak memberlakukan *social distancing* di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masjid jami', dan masjid-masjid lainnya. Kini juga tidak lagi mewajibkan orang menggunakan masker saat berada di tempat terbuka. Kewajiban penggunaan masker hanya diberlakukan di tempat tertutup.

Saudi juga tidak mensyaratkan sertifikat dengan hasil negatif dari tes PCR yang disertai atau Rapid Antigen Test sebelum kedatangan ke Kerajaan.Saudi juga telah membatalkan penerapan karantina institusional dan karantina rumah bagi para pendatang.

Terkait dengan hal ini, Kementerian Agama (Kemenag) menurunkan usulannya terkait Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) ke DPR RI. Sebelumnya mengusulkan mengusulkan Rp 45 juta. menjadi Rp 42.452.369. Usulan penurunan ini dihitung menyesuaikan adanya pencabutan sejumlah penerapan protokol kesehatan di Arab Saudi yang selama ini menjadi salah satu syarat penyelenggaraan umrah (KR, Kamis 17/3).

Perkembangan kedua, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas akan ke Arab Saudi untuk bertemu dengan Menteri Haji Saudi. Pertemuan akan membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2022. Hal ini terungkap saat Menag menerima audiensi Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Syekh Essam bin Abed Al-Taqafi, di Jakarta,

pekan lalu. Hanya saja, sampai saat ini belum diketahui jadwal pasti kapan keberangkatan Menag ke Arab Saudi.

Melihat perkembangan ini, tampaknya sudah ada tanda-tanda bahwa Indonesia akan bisa memberangkatkan jemaah pada musim haji 2022 nanti. Hanya saja sebelum ada penandatanganan *taklimatul haji*, kepastian itu belum kita peroleh. Begitu juga mengenai kepastian Indonesia akan mendapatkan kuota atau porsi haji tahun ini. Harapannya, Menag segera ke Arab Saudi dan membawa oleh-oleh keputusan 'hitam di atas putih' yang akan jadi pegangan dalam penyelenggaraan haji.

Para calon haji tahun 2020, yang sudah tertunda dua kali (2020 dan 2021), mestinya juga harus semakin intens dalam mempersiapkan diri, baik persiapan terkait materi manasik haji, terkait adaptasi yang harus dilakukan selama keberangkatan sampai pulang, maupun persiapan secara fisik. Khusus materi manasik, kalau tidak *di-up date* bisa jadi akan banyak yang lupa. Meski demikian, seandainya nanti Indonesia tidak memperoleh kuota penuh, sehingga terpaksa ada yang harus tidak berangkat tahun ini, maka juga harus bisa menerima dengan lapang dada.

Namun kita percaya, pemerintah Indonesia akan terus mengupayakan agar tahun ini dapat memberangkatkan jemaah haji. Bahkan Menag Yaqut Cholil Qoumas saat ke Arab Saudi nanti juga akan menjajagi kemungkinan memanfaatkan kuota negara lain yang tidak terserap habis.

Kita semua mesti mendukung dengan memperbanyak doa semoga upaya-upaya ini segera membuahkan hasil. Setelah itu kita menanti info-info terkait pemberangkatan jemaah haji. Harapannya akan selalu mendapat kabar gembira. □

Merapatkan Shaf Salat, Siapkah Kita?

WARTA KR (11/3) berjudul ”MUI: Shaf Salat Kembali Dirapatkan” menarik atensi penulis. Warta ini menjadi salah satu angin segar bagi umat Islam Indonesia. Pasalnya selama tempo 2 tahun wabah Covid-19 telah membelenggu kehidupan, menyebabkan implementasi salat menjadi terganggu seraya diberlakukannya sistem physical distancing (jaga jarak). Pemandangan baru ini kiranya nampak asing bagi kita karena selama ini sudah terbiasa melakukan salat dengan sistem merapatkan shaf.

Kita percaya merapatkan shaf adalah wujud dari kesempurnaan salat. Dalam narasi hadis Nabi Muhammad Saw telah dilukiskan secara eksplisit mengenai hal ini. Luruskan shaf-shaf kalian karena sungguh lurusnya shaf merupakan bagian dari kesempurnaan salat (HR. Muslim). Tak pelak umat Islam dianjurkan untuk mengerjakan salat dengan merapatkan shaf dalam kondisi normal tanpa ada bahaya atau keaduratan yang mengancam.

Lain halnya dengan kondisi kehidupan masa kini. Wabah Covid-19 datang menghantam dan menjungkirbalikkan seluruh konsep sosial, ekonomi, budaya, politik, pendidikan, dan juga agama. Kalau pun toh wabah ini resmi berakhir, niscaya dampak berkepanjangan masih akan dirasakan sampai tahun-tahun ke depan. Dengan demikian kita dapat berkata bahwa implementasi salat jaga jarak sudah sangat tepat diberlakukan demi menyelamatkan jiwa (*hifz al-nafs*) dari paparan virus sebagai bagian dari prinsip-prinsip pensyariatan (*maqashid al-syariah*).

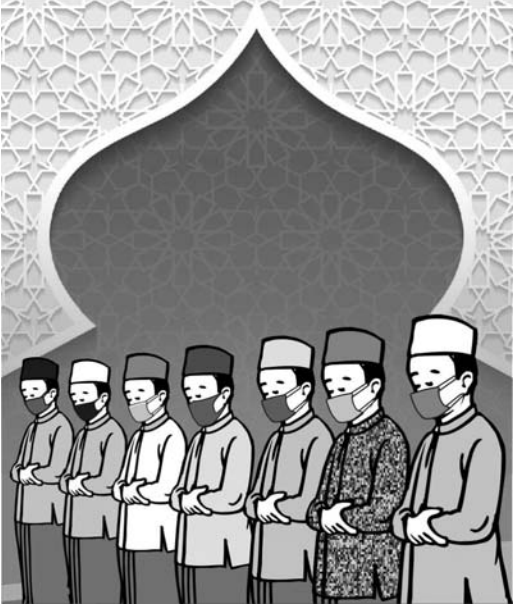
Sikap Kehati-hatian

Lahirnya seruan ini bersumbu pada aspek tren penurunan kasus Covid-19. Lagi pula, pemerintah juga telah melakukan sejumlah pelonggaran aktivitas masyarakat dan transportasi umum, seperti pesawat terbang dan kereta api. Begitu pula dengan aktivitas

Cristoffer Veron Purnomo

olahraga, sudah dimungkinkan dihadiri penonton (KR, 11/3). Andai kita ingin melaksanakan seruan tersebut, hal yang dibutuhkan adalah sebuah sikap kehati-hatian dan tanggung jawab bersama.

Kiranya perlu memahami dahulu kondisi yang terjadi di wilayahnya masing-masing. Bilamana masih terjadi kasus penularan yang tinggi, maka seyogianya dengan kejernihan nalar agar ditunda



KR-JOKO SANTOSO

dahulu untuk melaksanakan seruan itu. Hal ini berkelindan dengan adagium *dariul mafasid aula min jalbil mashalih* yang berarti mencegah mudarat lebih utama daripada membawa maslahat.

Di sinilah peran dan tugas dari takmir masjid yang harus peka dalam meneropong situasi sekitar. Pada saat yang sama harus berani mengambil kebijakan tegas agar pelaksanaan salat bisa berjalan dengan khushuk. Kuncinya takmir masjid wajib memberlakukan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat lagi. Utamanya masker sedemikian rupa harus digunakan oleh seluruh jamaah. Asanya seluruh jamaah sudah tertib dan

disiplin diri terhadap prokes sebagai bentuk upaya dan ikhtiar kolektif dalam meminimalisir penyebaran Covid-19.

Pembentukan Satgas Khusus

Kita memandang baik dengan adanya seruan MUI ini. Tetapi adakalanya perlu merenungkan diri seberapa jauh kesiapan kita dalam menjalankannya. Menyikapi hal ini, penulis mengusulkan agar diadakan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus. Maksud dan tujuan dibentuknya satgas khusus ini untuk mendukung tegaknya penerapan prokes di dalam masjid, sehingga mampu menciptakan rasa aman dan tenang bagi seluruh jemaah selama menunaikan salat.

Satgas khusus harus bertanggung-jawab atas kedisiplinan diri jemaah dalam menerapkan prokes. Mengingat bulan Ramadan segera tiba, yang biasanya masjid mengadakan pelbagai kegiatan spiritual yang turut mengundang orang banyak seperti salat tarawih, tadarus Alquran, itikaf, dan iftar. Maka satgas khusus mesti matang dalam menyiapkan segala infrastruktur yang mendukung berjalannya prokes, seperti suplai masker dan area khusus untuk mencuci tangan. Jika infrastruktur itu telah memadai, saya yakin kita akan siap lahir dan batin untuk melaksanakan seruan dari MUI tersebut. Bismillah! □

*) **Cristoffer Veron Purnomo**, Anggota Grup Jaringan Anak Panah dan Sahabat Pena Nusantara.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Label Halal; Wajah Ijtihad Mutakhir

Moh Rofqil Bazikh

kan suatu kesimpulan hukum terkait substansi sebuah produk.

Tentu hal yang mustahil ketika mencari sebuah putusan hukum dari literatur yurisprudensi Islam klasik. Saya dengan keras mengatakan tidak masuk akal, sebab pada masa klasik analisis kupasan tidak mengarah ke sana. Baru saat realitas mutakhir berkecambah dan dorongan untuk menentukan sebuah hukum terkait produk, ijtihad akan berdiri tegak di sana. Tidaklah mungkin untuk menetapkan sebuah hukum (baca: halal) dengan sewenang-wenang. Ada prosedur yang ketat dan harus dipatuhi oleh orang yang melakukan ijtihadó dalam hal ini bagian BPJPH. Prosedur yang ketat itulah yang saya sebut sebagai sebuah usaha untuk berjihad.

Jika pada masa klasik hukum Islam ijtihad dilakukan secara personal dan individual, berbeda dengan konteks Indonesia kini. BPJPH yang menjadi garda terdepan dalam hal ini, tentu tidak hanya dipunggawai oleh satu orang. Dengan demikian, ijtihad yang digunakan terkait label halal adalah wilayah kolektif. Bukan ranah individual untuk menentukan halal-haram sebuah produk yang nantinya mendapat sertifikat. Tentu, ijtihad kolektif ini lebih memberi kemudahan terkait penentuan hukum sebuah produk dibanding yang dilakukan secara personal.

Bagaimanapun bentuk ijtihad yang digunakan dalam domain ini tetap harus mendapat apresiasi. Ditambah dalam hal ini yang menjadi komando barisan adalah Kemenag sendiri. Dalam kacamata saya, setidaknya itulah yang membuat kerja Kemenag menjadi tam-

pak konkret. Terlepas dari semua kritik yang menghantam setelah kebijakan ini dilayangkan. Sekaligus mengilustrasikan bahwa hukum Islam dan ijtihad fikih mutakhir di Indonesia tidak dalam posisi statis. Barangkali, dengan adanya kesadaran akan hal ini semangat untuk menemukan hukum baru semakin membuncah. Paling tidak dorongan psikologis bagi umat muslim dan pakar hukum Islam ketika melihat ilustrasi yang saya paparkan.

Bagaiman terkait isu nuansa Jawa pada label halal, apakah sesuatu yang urgen? Meski menyakut ranah rasial, bagi saya persoalan tersebut tidak perlu dibesar-besarkan dan bukan cakupan pembahasan di sini. Hanya saja, Kemenag tetap harus memperhatikan aspirasi sebagian masyarakat serta putusan mutlak berada di tangan Kementerian Agama. **Waallahu ailam..** □

*) **Moh Rofqil Bazikh**, mahasiswa Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pojok KR

Anggaran Pemilu 2024 disepakati Rp 86 triliun.
- **Berarti tidak ada penundaan.**

Waspada cuaca ekstrem di Jateng Selatan.
-- **Semua harus siaga bencana.**

Direvisi, Klaim JHT lebih muda.
-- **Jangan persulit ambil hak sendiri.**

Berabe

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA

@ pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Jalan Gelap GiriSubo - Rongkop

KEJAHATAN biasanya berak-si jika mendapat kesempatan, seperti tempat-tempat yang gelap. Selain itu, Gunungkidul akhir-akhir ini sudah mendapat kunjungan wisatawan domestik. Kenyataan saat ini, sepanjang jalan GiriSubo - Rongkop jika malam hari gelap, karena kurangnya penerangan lampu jalan.

Warga sangat senang jika sepanjang jalan tersebut diperpanjang penerangan jalan. Apalagi menjelang buan RTamdan

dan selanjutnya hari raya Idul Fitri, dimana sekarang mudik sudah diperbolehkan pemerintah. Warga Gunungkidul banyak yang 'mboro' merantau ke luar daerah, biasanya akan mudik. Mudah-mudahan pihak yang berwenang memperhatikan . Terima kasih. □

Apitu Wargito, Kani Binmas Sek GiriSubo/Perum Pesona Handayani Indah, Bllok E 9, Jeruksari, Wonosari Gunungkidul.

Sambut Bulan Ramadan tetap Jaga Kesehatan

BULAN Ramadan tak lama, tinggal menghitung hari. Keindahan bulan suci tersebut, mari kita sambut. Bukan hanya dengan kegiatan yang bermanfaat, namun juga ajakan untuk saling meghormati sesama umat. Karena suasana masih

pandemi, masjid-masjid tetap saja kita harapkan mengingatkan senantiasa menjaga Kesehatan agar kita tetap sehat walafiat, bisa mudik dengan nyaman. □

H Burmani, Jl Sugondo, Wonosobo Barat.

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penasehat: Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio** : KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Pewakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lamparsari No 62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPD. Kepala Biro : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.

Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPD Kepala Biro : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.